

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partai Persatuan Pembangunan memiliki kontribusi terhadap perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai konsekwensi kemenangan PPP dalam Pemilu 1999, mulai dari ide awal, lobi politik yang dilakukan di Daerah dan pusat, dalam kaitan penyelesaian konflik di Aceh, sehingga dapat didukung oleh kolektifitas rakyat melalui perwakilannya di DPRD Provinsi Aceh dan DPR.RI. Bukti konkritnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta beberapa Peraturan Daerah/Qanun yang melegalitaskan penerapan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1999 di Aceh, karena adanya keterkaitan emosional keagamaan antara PPP dengan latar belakang sejarah Aceh, yang selalu berjuang dan berupaya menerapkan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka upaya Partai Persatuan Pembangunan memperjuangkan asfirasi rakyat sesuai khittah perjuangan partai, serta berusaha untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan serta kemaslahatan umat.
3. Dalam perjuangannya untuk legalitas memberlakukan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Partai Persatuan Pembangunan berperan aktif di lembaga legeslatif (DPRD NAD dan DPR.RI), masih menghadapi kendala bagi PPP sendiri, antara lain kelemahan Sumber Daya Manusia, sistem kader yang terbuka, klaim yang baik usaha perseorangan, semakin jauhnya kader dan fungsionaris PPP dengan ulama, disamping terkondisinya Indonesia bukan negara agama, dan syari'at Islam merupakan ancaman.
4. Penerapan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memiliki peluang, berdasarkan Undang-Undang yang ada, Daerah dapat

mengatur sendiri untuk kemaslahatan Daerah sendiri. Namun masih banyak hambatan-hambatan dalam aplikasinya di lapangan yang antara lain, Sumber Daya Manusia yang lemah, masih sedikitnya qanun-qanun pendukung sebagai kekuatan formal, sarana prasarana yang masih terbatas, aparat penegak hukum kurang memiliki pengetahuan Islam, serta belum sepenuhnya ada keyakinan bahwa Syari'at Islam itu akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

5. Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bermasalah dalam aqidah yang Ahlussunnah wal jama'ah, tetapi menjadi problem dilapangan manakala berbicara masalah fiqh, karena terdapat beberapa pengikut mazhab fiqh yang berbeda.

## B. Saran-saran

1. Agar para kader PPP dan seluruh komponen masyarakat melalui perwakilannya di Parlemen, agar terus memperbanyak referensi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan khususnya tentang seluk beluk keislaman, agar persoalan yang dihadapi menyangkut keagamaan tidak kaku, sehingga hasil yang dicapai dari pembahasan akan dapat langgeng dan memuaskan.
2. Para kader dan fungsionaris PPP agar tetap menjaga kedekatan, keharmonisan, silaturahmi dengan para ulama di wilayahnya masing-masing, sebab ulama adalah tempatnya bertanya bagi para kader PPP khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Karena peluang sudah di miliki, kedepan bagaimana rakyat dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menata dirinya sendiri, melalui kewenangan membuat qanun-qanun yang lebih banyak dan memadai, untuk kelanjutan Penerapan Syari'at Islam. Lebih meningkatkan kesadaran, ini merupakan tugas Pemerintah Daerah, para wakil rakyat, para ulama serta seluruh pihak untuk merumuskan hal yang terbaik untuk rakyat Aceh

4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terus secara bertahap melengkapi sarana prasarana pendukung penerapan Syari'at Islam di Aceh, perhatian, peningkatan pembinaan dan kesejahteraan terhadap Wilayahul Hisbah sebagai ujung tombak di lapangan, termasuk upaya peningkatan kerja sama dengan para Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, harus memiliki keilmuan tentang Islam, jika perlu alumni dari pendidikan keagamaan ( Madrasah Aliyah, Pesantren dan Perguruan Tinggi Agama Islam) yang diterima menjadi Polisi, Jaksa dan Hakim di Aceh.
5. Diharapkan kepada IAIN sebagai pusat Studi keislaman yang telah memiliki konsentrasi Fiqh Modren Strata 3 yang berkerja sama Perguruan Tinggi Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam negeri dan swasta, kiranya dapat menjadi sponsor, promotor berupa karya tentang fiqh Modren untuk kondisi Aceh masa kini dan masa yang akan datang.

Akbar, 1980)

Budiardjo, *Merintis Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: UI-Press, 1987)

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Lahir Belahung Politik dan Masa Depan*, (Jakarta:

Cita Panca Sarungkel, 1995)

Kamal, Taufik Adnan dan Pargobeani, Samud Riaz, *Politik Syari'at Islam dan Indonesia Menggo Nigeria* (Jakarta: Pusaka Alfabet, 2004)

Kinowidjaya, *Jabatan Politik umat Islam*, (Jakarta: Kerja sama Mizan dengan Majelis Umat, 1997).

Kundi, Muliadi, *Membauri Kemandirian Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi* *Eksplo dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PANA, 2005)

Marysoni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Muhammed, Rusli Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Ishtai dan Implementasi*, (Banda Aceh-Jakarta: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan

Logos Wacana Ilmu, 2003)

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hakim, Sudarnoto, *The Partai Persatuan Pembangunan*, (Thesis di McGill University Montreal Canada, 1993). digandakan oleh Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI 1996/1997.
- Abubakar, Alyasa, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005)
- , *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005)
- Amiruddin, M. Hasbi, *Perjuangan Ulama Aceh Di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: CENINNETS Press, 2004)
- Atjeh, Aboebakar , *et.al. Bunga Rampai tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980)
- Budiardjo, Meriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: UI-Press, 1989)
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa depannya*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1995)
- Kamal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Jakarta: Kerja sama Mizan dengan Majalah Umat, 1997)
- Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA , 2005)
- Maryaeni, *Metode Penelitian Keбудayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, solusi dan Implementasi*, (Banda Aceh-Jakarta: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Logos Wacana Ilmu, 2003)

- Qomar, Mujamil *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Instusi*, (Jakarta : Erlangga, t.th.)
- Reid, Anthony, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Siddik, M. Dja'far, *PPP Repormasi membangun Indonesia Baru* (t.t: t.th, 2003)
- Syahrizal (editor), *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003)
- Soefihara, Endin A.J., *Merebut Nurani Rakyat*, (Jakarta: Blantika PT Mizan Publika, 2005)
- Thayeb, T.Hasyim. *Sejarah Singkat Fusi 4 Partai Islam*, ttp,tt. Pusat Bahasa Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Team Penyusun, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh , 1990
- Team Penyusun, *Ensiklopedia Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Team Penyusun, *Mendayung disela-sela Karang. Pokok-pokok Pikiran Ketua Umum DPP.PPP H. Ismail Hasan Metareum, SH*, (Jakarta: DPP.PPP, 1994)
- Team penyusun, *Ketetapan-ketetapan Muktamar* (Jakarta: Sekretariat DPP. PPP Jl. Diponegoro No. 60, 2004)

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
PIMPINAN HARIAN WILAYAH**

Syah Kuala No.233 Po.Box 162 Telp.(0651) 7428665-Fax. 638509 Banda Aceh

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 274/KET/A/IX/2006

Pimpinan Harian Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini menyatakan bahwa benar :

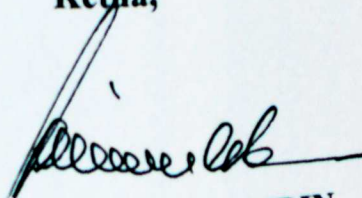
Nama : Al Misry  
Nim : 04 PEMI 826  
Prog. Sutdi : Pemikiran Islam

Benar nama tersebut di atas, telah melakukan penelitian pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan judul "**Kontribusi Politik PPP dalam proses legalitas Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam**" dalam penyusunan tesis S2 pada IAIN Sumatera Utara.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Ramadhan 1427 H.  
27 September 2006 M.

Ketua,

  
TGK. H. ZAINAL ABIDIN

**PIMPINAN HARIAN WILAYAH**  
Partai Persatuan Pembangunan  
DPW  
Nanggroe Aceh Darussalam  
Sekretaris,  
  
H. MUZAKKI SALHA

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
PIMPINAN HARIAN PUSAT**

**Alamat: Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta, Telepon (021) 31936 338 Fax (021) 314 2558**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 1888/KET/DPP/XI/2006

Bismillahirrahmanirrahiem

Pimpinan Harian Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan dengan ini menerangkan :

Nama : Al Misry  
N I M : 04 PEMI 826  
Prog. Studi : Pemikiran Islam

Bahwa saudara tersebut diatas telah melakukan penelitian guna memperoleh data untuk penyusunan tesis S2 dengan judul "KONTRIBUSI POLITIK PPP DALAM PROSES LEGALITAS SYARI'AT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM" dan diterima oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan.

Demikianlah surat keterangan ini harap maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 Nopember 2006

**PIMPINAN HARIAN PUSAT**  
Sekretaris Umum  
  
(HM. Yunus Yosfiah)

Tembusan:  
1. Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, di Medan  
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
**DINAS SYARIAT ISLAM**

دینس شریعة اسلام قرونی نفکرونی اچیہ دار السلام

JALAN T. NYAK ARIEF NO. 221 TELEPON (0651) 7428639 - 7428641 BANDA ACEH 23114

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SLP.451.02/564/IX/2006

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ZIAUDDIN AHMAD, S, Ag**  
NIP : 150 170 594  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, (IV/b)  
Jabatan : Wakil Kepala Dinas Syariat Islam  
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AL MISRY**  
NIM : 04 PEMI 826  
Pekerjaan : Mahasiswa S2 Program Pascasarjana  
IAIN Sumatera Utara.  
Program Studi : Pemikiran Islam  
Alamat : Jln. Pembangunan Komplek Pondok  
Surya Helvetia Timur Medan

2. Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari tanggal 27 s.d 28 September 2006 dengan judul tesis **"Kontribusi Politik PPP Dalam Proses Legalitas Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam"**

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 September 2006 M  
05 Ramadhan 1427 H

Wakil Kepala,  
DINAS SYARIAT ISLAM  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
**H. ZIAUDDIN AHMAD, S. Ag**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 150 170 594



## DAFTAR WAWANCARA

### I. DPP. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Dalam buku Kecil Sejarah Fusi 4 Partai di Aceh yang ditulis Hasyim Tayeb, ada tersebut nama Baihaqi, apakah itu nama Bapak ? (khusus Prof. Baihaqi AK)
2. Sebagai Pengikut DI/TII di Aceh tahun 1953, apakah benar cita-cita yang ikhlas adalah otonomi khusus agar SI dapat diberlakukan ? (khusus Prof. Baihaqi AK)
3. Bapak yang punya karir di PNS/Dosen apakah Bapak tidak dicurigai sebagai Kader Masyumi, mantan Pengikut DI/TII dan Anggota PPP ? (khusus Prof. Baihaqi AK)
4. Apakah keterkaitan PPP dengan penerapan Syari'at Islam ?
5. Lahirnya UU no. 44/1999 dan UU no. 18/2001, apakah ada peran PPP ?
6. Apa filosofi dari kelahiran kedua UU tersebut ?
7. secara khusus apa latar belakang atau ide awal tentang di lahirkannya Undang Undang No. 44 tahun 1999 ?
8. Undang Undang No.18 Tahun 2001 lahir atas dasar usul inisiatif Anggota Dewan, apa yang diharapkan orang Aceh dari Undang- Undang tersebut ?
9. Sejauh mana peran Anggota Fraksi PPP dalam proses lahirnya kedua Undang-Undang tersebut.?
10. Apakah ada hambatan dalam proses lahirnya UU tersebut ?
11. Apakah PPP berkepentingan secara politis tentang pencantuman SI dalam kedua Undang Undang tersebut?
12. Bagaimana tanggapan, dukungan dan peran Anggota DPR.RI secara umum dalam proses lahirnya kedua Undang-Undang tersebut diatas

### II. DPW.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Bagaimana sejarah PPP di Aceh dari sejak proses deklarasi sampai dengan sekarang ini tahun 2006. ?
2. Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh PPP Aceh sehingga mendapat dukungan suara dari rakyat yang dari pemilu ke pemilu di Aceh PPP menjadi

- perhitungan besar, apakah ada kaitannya PPP dengan ormas Islam seperti NU, kader-kader Masyumi, Syarikat Islam dan Perti di Aceh ?
3. Menurut PPP apa upaya politik yang telah diperbuat PPP untuk mensejahterakan rakyat sejak lahirnya sampai sekarang
  4. Apakah keterkaitan PPP dengan penerapan Syari'at Islam ?
  5. Apakah PPP komitmen dengan pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan secara legal formal ?
  6. Lahirnya UU no. 44/1999 dan UU no. 18/2001, apakah ada peran PPP dari Provinsi Aceh ?
  7. Apa filosofi dari kelahiran kedua UU tersebut menurut PPP Aceh ?
  8. Secara khusus jika RUU no 18/2001 adalah hasil rumusan DPRD Aceh yang di bawa ke Jakarta, dimana letak posisi PPP dalam proses hingga disahkannya menjadi Undang-Undang ?
  9. Apa keterkaitan Undang Undang dengan solusi penyelesaian komplik yang berkepanjangan Aceh
  10. Apakah diantara penyelesaian komplik di Aceh adalah penerapan Syari'at Islam ?
  11. Apakah PPP mengklaim, bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh adalah konsep dari PPP ?
  12. Jika tidak ada klaim, bagaimana dukungan rakyat melalui perwakilannya di DPR RI/DPRD Aceh dalam ide serta konsep penerapan Syari'at Islam ?
  13. Bagaimana kerja sama dengan Partai-partai Islam yang ada di Aceh ?
  14. Apakah ada pihak yang tidak setuju dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh serta apa alasannya ?
  15. Bagaimana PPP dan Partai Islam lainnya meyakinkan pihak yang menolak penerapan Syari'at Islam di Aceh
  16. Setelah lahirnya UU tersebut diatas, apa langkah PPP untuk Aceh ?
  17. Apakah bentuk konkrit ide politik PPP dalam menindak lanjuti Undang Undang tersebut ?
  18. Apakah PPP memiliki konsep ranperda/ranqanunda ?
  19. Bagaimana sistem pembahasan Perda/Qanunda di DPRD ?

20. Hal-hal apakah yang merupakan contoh adanya perbedaan pandangan terhadap ranperda/ranqanunda yang memerlukan perhatian khusus PPP ?
21. Apa kelemahan SDM sebahagian Anggota DPRD sehingga pembahasan mulus-mulus saja ?
22. Setelah ranperda/ranqanunda disahkan, apalagi langkah-langkah PPP ?
23. Setelah adanya peraturan/instruksi gubernur untuk tindak lanjut dari Perda/qanunda, bagaimana PPP melihat aktualisasi di masyarakat ?
24. Apakah dengan penerapan Syari'at Islam dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah, konflik Aceh sudah mereda ?
25. Apakah dengan adanya legalitas Syari'at Islam di Aceh semua pihak telah turut berpartisipasi termasuk Pemerintah ?
26. Masyarakat menilai bahwa Syari'at Islam itu hanya hukum cambuk dan diterapkan kepada rakyat kecil, bagaimana komentar PPP ?
27. Apakah ekskusi cambuk di Bireun yang pertama terjadi karena didasari Bupatinya orang PPP yang dilaksanakan lebih melihat dari sisi politis ?
28. Apakah yang menjadi tantangan penerapan syari'at Islam di Aceh ?
29. Bagaimana saran PPP untuk mengatasi tantangan penerapan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
30. Bagaimana idealnya Daulah Islamiyah yang didengungkan PPP dalam konteks Aceh yang modern ?

### III. KANTOR DINAS SYARI'AT ISLAM PROVINSI NANGGROE ACEH

#### DARUSSALAM

1. Bagaimana proses terbentuknya Dinas Syari'at Islam di Provinsi Aceh dan di Kabupaten/Kota ?
2. Bagaimana korelasi Dinas Syariat Islam dengan beberapa lembaga lain, seperti Kanwil Departemen Agama, Biro Keistimewaan Setda Provinsi, DPRD Prov. NAD, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah di Prov. NAD ?
3. Dalam keberadaan Dinas Syari'at Islam ini, berapa Qanun yang diajukan kepada DPRD yang terkait dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh ?

4. Apakah yang melatar belakangi Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Syari'at Islam untuk membuat rancangan Perda/Qanun
5. Dalam proses pembahasan bersama di DPRD, adakah hal-hal yang menjadi catatan penting bagi Dinas Syari'at Islam ?
6. Apakah sudah cukup memadai qanun-qanun yang telah di sahkan DPRD dalam konteks penerapan Syari'at Islam di Aceh ?
7. Bagaimana penerapan Syari'at Islam di Daerah-daerah seluruh Aceh ?
8. Kenapa hanya cambuk/uqubat saja yang nampak kepermukaan dari kebijakan penerapan Islam di Aceh ?
9. Dimana letak konkrit bahwa penerapan Syari'at Islam akan membawa dampak untuk kemaslahatan umat di dunia dan akherat ?
10. Apakah Hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?
11. Bagaimana kerja sama Dinas Syari'at dengan lembaga ilmiah seperti IAIN Ar-Raniry dalam proses pembuatan Ranperda/ranqanunda di Aceh ini ?
12. Bagaimana kerja sama Dinas Syari'at Islam dengan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh ini ?

#### IV. TOKOH MASYARAKAT YANG TERKAIT JUDUL PENELITIAN

1. Bagaimana menurut anda, maka PPP menang dalam Pemilu 1999 ?
2. Bagaimana menurut anda keterkaitan PPP dengan penerapan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?
3. Bagaimana pandangan anda di Aceh telah di terapkan Syari'at Islam ?
4. Apa untung ruginya di Aceh di terapkan Syari'at Islam ?
5. Apa anda yakin penerapan Syari'at Islam di Aceh akan membawa keadilan, kedamaian dan kebahagiaan hidup manusia di dunia sampai ke akherat ?
6. Apa yang menurut anda menjadi tantangan dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh ?
7. Bagaimana menurut anda penerapan Syari'at Islam di Aceh untuk masa mendatang ?

## DAFTAR INFORMAN

### A. DPP. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Prof.DR.H.Baihaqi AK (anggota Fraksi PPP DPR.RI Masa Bakti 1999-2004)
2. DR.H.Zein Badjeber,SH (anggota Fraksi PPP DPR.RI Masa Bakti 1999-2004)
3. DR.H.Mukhtar Aziz,MA (Anggota Fraksi PPP DPR.RI Masa Bakti 2004-2009)
3. H. Eidil Suryadi (Wakil Bendera DPP.PPP dan anggota Fraksi PPP DPR.RI Masa Bakti 2004-2009)
4. Drs.H. Muhammad Yus ( Ketua DPRD Prov. NAD 1999-2004 dari PPP, sekarang Ketua DPP. PPP dan anggota Fraksi PPP DPR.RI Masa Bakti 2004-2009)

### B. DPW.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Tgk. H. Zainal Abidin (Ketua DPW. PPP Prov. NAD/Wakil Ketua DPRD Prov. NAD dari PPP Masa Bakti 2004-2009)
2. Drs. Bahroem M. Rasyid ( Wakil Sekretaris DPW. PPP NAD/Sekretaris Fraksi PPP DPRD Prov. NAD Masa Bakti 2004-2009)
3. Drs. H. M. Munir Aziz (Wakil Ketua DPW. PPP NAD/Anggota DPRD Prov. NAD masa Bakti 1999-2004)
4. Drs. Mustafa A. Geulanggang (Wakil Ketua DPW. PPP NAD / Bupati Bireun Prov. NAD)
5. Ahmad Zaini Ibrahim (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PPP Prov. NAD/mantan Sekretaris pekerja Kelompok 1973)
6. H. Rusli Ibrahim ( anggota Fraksi PPP DPR.RI PAW dari Tgk. Nashiruddin Daud yang terbunuh oleh OTK dan mayatnya diketemukan di sekitar Sibolangit Sum. Utara tahun 2000 Masa Bakti 1999-2004)

### C. KANTOR DINAS SYARIAH ISLAM DAN TOKOH MASYARAKAT

1. Prof.DR.H.Alyasa Abubakar,MA (Kepala Dinas SI Prov. NAD)

2. Drs.H.Saleh Suaidy ( Kalitbang Dinas SI Prov. NAD)
3. Hj. Fauziah, BA ( Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Tengah)
4. Rezeki Linsa, S.Ag ( Wilayahul Hisbah)
5. Tgk. Ibrahim Mantiq seorang Ulama di Kabupaten Aceh Tengah yang lahir tahun 1925 wafat tanggal 28 September yang lalu di kediamannya Kampung Kenawat Lut Tawar Kabupten Aceh Tengah
6. Tgk. Abdul Gani Aman Firdaus mantan DI/TII dan masih dianggap penasehat GAM ketika gerakan ini mulai lagi di era reformasi
7. Fauzan Azima seorang Mantan Panglima GAM wilayah Linge meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues
8. M.Syarif (pernah di vonis Pengadilan Negeri Takengon karena dugaan terlibat Separatis GAM, dan dinyatakan bebas setelah perjanjian Damai RI-GAM tanggal 15 Agustus 2005

## RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : A L MISRY  
2. NIM : 04 / Pemi / 826  
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Keunawat Takengon, 20 Pebruari 1965  
4. Pekerjaan : 1). Mahasiswa PPs IAIN Su. Utara Medan  
2). Dosen Tetap STAI Gajah Putih  
Takengon Aceh  
5. Golongan / pangkat : III/d Lektor bidang Pemikiran Islam ✓  
6. Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Blang Kolak II  
Takengon Aceh Tengah

### II. JENJANG PENDIDIKAN

1. MIN Kenawat Lut Takengon : Ijazah tahun 1976  
2. MTsN II Takengon : Ijazah tahun 1980  
3. MAN 1 Takengon : Ijazah tahun 1983  
4. Fak. Ushuluddin IAIN SU, Medan (S-1) : Ijazah tahun 1988  
5. PPs IAIN Sumatera Utara Medan ( S-2 ) : 2004 – sekarang

### III. KELUARGA

1. Orang Tua ( Ayah ) : Karimuddin (alm 21 Mei 1983)  
( Ibu ) : Sri Banun  
2. Istri : Raimah Tussakdiah  
3. Anak : 1. Maya Araini Putri lahir 1990  
2. Aramiko lahir 1993  
3. Ikhyar Umara Lathif lahir 1999  
4. Muallim Thahari lahir 2004

### IV. PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 1989-1999 : Guru Tidak Tetap MTsN I Takengon  
2. Tahun 1994-1998 : Guru Tidak Tetap MAN I Takengon  
3. Tahun 1989-1994 : Kabag. Tata Usaha STIT Gajah Putih Takengon

4. Tahun 1989-sekarang: Dosen Tetap STIT/STAI Gajah Putih Takengon
5. Tahun 1996-1997 : PAW Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah
6. Tahun 1999-2004 : Anggota DPRD Kab. Aceh Tengah
7. Tahun 2004-sekarang: Ketua STAI Gajah Putih Takengon

#### **V. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Tahun 1982-1983 : Sekr. I Pelajar Islam Indonesia DPD Aceh Tengah
2. Tahun 1984-1986 : Wk. Ketua I IMAGA Wil. I Medan Timur
3. Tahun 1984-1986 : Sekum. HIMMAH Kom.Fak.Ushuluddin IAIN.SU
3. Tahun 1985-1987 : Wk.Sek.II SEMA Fak. Ushuluddin IAIN. SU Medan
4. Tahun 1986-1988 : Wk.Ket. Bid.Perg.Tinggi HIMMAH Kodya Medan
5. Tahun 1986-1988 : Wk. Ketua Bidang Organisasi PP. IMAGA Medan
6. Tahun 1988-1990 : Koord. Sanggar "Universal" Kenawat Takengon
7. Tahun 1989-1999 : Ketua DPC. GMPI Kab. Aceh Tengah
8. Tahun 1990-1995 : Ketua Komcat PPP Kecamatan Kota Takengon
9. Tahun 1996-1998 : Pengurus DPD.KNPI Kabupaten Aceh Tengah
10. Tahun 1995-1999 : Sekretaris DPC. PPP Kabupaten Aceh Tengah
11. Tahun 1999-2004 : Wakil Ketua DPC. PPP Kabupaten Aceh Tengah
12. Tahun 2002-2004 : Tim Ahli Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
13. Tahun 2003-sekarang : Pengurus PMI Cabang Aceh Tengah
14. Tahun 2003-Sekarang: Ketua PSKLH Perg. Tinggi Gajah Putih Takengon
15. Tahun 2004-sekarang : Wk. Ketua II Yayasan Gajah Putih Takengon
16. Tahun 2004-sekarang : Ketua DPC. PPP Kabupaten Aceh Tengah

#### **VI. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DI IKUTI**

1. Basic Training Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980
2. Latihan Kader Dasar HIMMAH Kodya Medan tahun 1983
3. Latihan Kader Menengah HIMMAH Kodya Medan ( sertifikat 1985 )
4. Pelatihan Penelitian Dosen Kopertais Wilayah V Aceh (sertifikat 1995)
5. LKM PPP Prov. D.I. Aceh di Saree Aceh ( sertifikat 1996)
6. Kursus AMDAL "A" pada UI Jakarta ( Sertifikat 2002)



7. Pelatihan Otonomi Daerah Depdagri di Bekasi (sertifikat 2002)
8. Kuliah pada PPs Magester Manajemen Unsyiah Banda Aceh selama 1 semester Tahun Akademi 2002/2003 (mengundurkan diri)
9. Penilaian LPJ Kepala Daerah Depdagri di Jakarta (sertifikat 2003)

#### **VII. KARYA TULIS**

1. Dasar Dasar Orientasi Pemikiran Filsafat Etika Dalam Ajaran Islam (Skripsi pada Fak. Ushuluddin IAIN. SU. Medan Jur. Aqidah Filsafat tahun 1988)
2. Dampak PT. Kertas Kraaf Aceh terhadap Masyarakat Aceh Tengah (Penelitian Tahun 1996 di Takengon)
3. Diktat "Pengantar Ilmu Agama Islam" STIT Gajah Putih Takengon (tahun 1991)
4. Diktat "Filsafat Umum" STIT Gajah Putih Takengon (tahun 1995)
5. Pergeseran Nilai Moral di Kalangan Remaja Aceh Tengah (penelitian tahun 1997)
6. Diktat "Ilmu Kalam" STAI Gajah Putih Takengon 1999
7. Menulis di SKU "Loeser Antara" Medan, Buletin "Teganing" Pemda Aceh Tengah, Jurnal Gema Gajah Putih STAI Gajah Putih Takengon

Medan, 2 Nopember 2006.-

AL MISRY  
NIM. 04 / Pemi/ 826